

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi kebijakan pembangunan zona integritas merupakan bentuk tindakan yang diwujudkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Indonesia. Dalam implementasi kebijakan tersebut pemerintah melalui kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, melaksanakan berbagai program atau kegiatan yang bertujuan untuk mencegah, mendeteksi serta menindaklanjuti segala bentuk praktik korupsi yang terjadi. melalui implementasi tersebut juga terdapat tujuan lain yakni perbaikan pada tata kelola pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat melalui reformasi birokrasi.

Peraturan yang menjadi latar belakang lahirnya kebijakan Pembangunan Zona Integritas adalah (Inpres Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012) yang menginstruksikan kepada para menteri dan kepala lembaga negara beserta kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Menanggapi Inpres tersebut, Menteri PAN dan RB menerbitkan Permenpan-RB Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi yang kemudian mengalami pembaharuan melalui Permenpan-RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan ZI di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Seiring berjalannya waktu, kebijakan tentang pedoman pembangunan Zona Integritas ini sudah mengalami beberapa kali perubahan, yang mana pada tahun 2021 pedoman kebijakan tersebut kembali mendapat penyesuaian dan pembaharuan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Aturan tersebut merupakan perubahan atas peraturan sebelumnya yakni PermenPan-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Perubahan tersebut dilakukan lantaran aturan yang dipakai sebelumnya sudah tidak sesuai dengan kerangka penilaian reformasi birokrasi sebagaimana yang diatur dalam PermenPAN-RB No. 26 Tahun 2020 Tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.¹

Pembangunan zona integritas di Indonesia pada mulanya terinspirasi dari konsep yang dikembangkan dalam kajian keilmuan administrasi publik dan tata kelola pemerintahan yang kemudian disebut dengan *Island of Integrity*. Konsep ini menggambarkan suatu kondisi yang mana suatu unit kerja mampu untuk kebal serta tetap memberikan tata kelola yang baik meskipun berada dalam lingkungan dengan tata kelola serta manajemen yang buruk. Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut Thorkildsen mengatakan bahwa konsep *island of integrity* atau zona

¹Permenpan RB, 'Permenpan Rb 90/2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani

integritas mengarah pada upaya untuk memperlihatkan kinerja terbaik meskipun berada di bawah situasi yang sulit sekalipun.²

Konsep *island of integrity* terdiri dari dua suku kata yakni *island* yang berarti “Pulau” dan *integrity* yang berarti “Integritas”. Sebagaimana pengertian yang penulis kutip dalam artikel pada situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia, secara harfiah *island of integrity* dapat diterjemahkan sebagai pulau integritas.³ Akan tetapi dalam pengadopsian pada konteks kebijakan di Indonesia, pulau integritas tampaknya mengalami perkembangan definisi menjadi zona integritas.

Pada konteks kebijakan pembangunan zona integritas di Indonesia, berdasarkan PermenPAN-RB NO. 90 Tahun 2021. Zona Integritas atau yang kemudian disingkat ZI adalah sebutan untuk instansi pemerintah yang telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) melalui reformasi birokrasi, terkhusus dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Kemudian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, serta telah memenuhi sebagian besar komponen pengungkit dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta

² *Ibid.* Hal 10.

³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Belajar Konsep Island of Integrity dari Burung*. Atau melalui Link: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15098/Belajar-Konsep-Island-Of-Integrity-dari-Burung.html>, diakses 10 Oktober 2023.

pelayanan publik yang prima.⁴ Selanjutnya Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, dengan telah telah memenuhi sebagian besar kriteria pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik prima.

Kedua predikat di atas pada dasarnya merupakan sebuah penghargaan yang diberikan kepada suatu instansi/unit kerja/satuan kerja yang dinilai berhasil dalam memenuhi indikator-indikator capaian serta penilaian sebagaimana yang sebelumnya telah ditetapkan dalam isi dokumen kebijakan. Penghargaan tersebut juga menjadi simbol bahwa unit kerja telah mampu mengimplementasikan kebijakan dengan baik dan patut diberi apresiasi melalui predikat tersebut.

Pada penghujung tahun 2021 yang lalu, sebanyak 558 unit kerja di seluruh Indonesia ditetapkan oleh Kemenpan sebagai unit kerja dengan predikat zona integritas. Predikat tersebut terdiri dari 486 sebagai unit kerja berpredikat WBK dan 72 unit kerja berpredikat WBBM.⁵ Predikat tersebut diberikan kepada unit kerja pelayanan strategis yang pimpinan beserta jajarannya mempunyai komitmen yang kuat untuk mewujudkan budaya kerja yang anti terhadap korupsi dalam birokrasi yang bersih dan melayani dengan prima.

⁴PermenPan-RB NO.90 Tahun 2021, merupakan enam area perubahan reformasi birokrasi yang terdiri dari (manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia/SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja)

⁵ Kemenpan, selengkapnya dapat diakses melalui *link*: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/558-unit-bebas-dari-korupsi-lahir-di-penghujung-tahun>, diakses 10 Oktober 2023.

Selanjutnya pada Tahun 2022 sebanyak 119 unit kerja dengan predikat zona integritas kembali ditetapkan oleh Kemenpan-RB. Jumlah tersebut terdiri dari 102 predikat WBK dan 17 unit kerja predikat.⁶ Berdasarkan data serta penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun terdapat unit kerja yang berhasil melakukan pembangunan zona integritas dan diberi predikat WBK maupun WBBM. Oleh sebab itu, sudah seyogyanya program-program serta kegiatan yang dibawa oleh kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang lebih baik bagi lingkungan tempat kebijakan tersebut diimplementasikan. Sebab, itulah yang menjadi tujuan adanya kebijakan tersebut.

Kajian mengenai kebijakan pembangunan zona integritas telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Diantara kajian tersebut dilakukan oleh Siti Maulani dengan judul "Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi di Lingkungan Kelurahan Makasar Jakarta Timur",⁷ hal yang menjadi fokus penelitian ialah untuk mengetahui bagaimana efektivitas, faktor pendukung dan penghambat Permenpan-RB Nomor 10 Tahun 2019, terhadap ketertiban, kecepatan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang ada di Kantor Kelurahan Makasar yang dianalisis menggunakan teori integritas dan teori sistem hukum.

Kemudian juga terdapat penelitian Alfathansyah Widyantoro, yang berjudul "Pembangunan Zona Integritas Sebagai Upaya Pemerintah Menciptakan Wilayah

⁶Kemenpan, Beri Penghargaan Instansi Pemerintah Berprestasi *Link:* <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/beri-penghargaan-instansi-pemerintah-berprestasi-kementerian-panrb-kerja-birokrasi-harus-berdampak>, diakses 10 Oktober 2023.

⁷ Siti Maulani, *Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi di Lingkungan Kelurahan Makasar Jakarta Timur*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) 2022

Bebas Korupsi”.⁸ Fokus penelitian terdapat pada analisis proses pembangunan zona integritas berdasarkan PermenPan-RB No.52 Tahun 2014, serta kendala yang dihadapi dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori administrasi publik dan reformasi birokrasi.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Andhi Sukma Hanafi dan Mugi Harsono dengan judul “Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dengan Pembangunan Zona Integritas Pada Kementerian Perindustrian”.⁹ Fokus penelitian ini ialah pada pelaksanaan serta pengukuran pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di Kementerian Perindustrian.

Dari *literature review* yang telah dilakukan pada beberapa penelitian atau kajian terdahulu di atas, masing-masing penelitian memiliki fokus kajian serta pembahasan yang unik. Dalam penelitian Siti Maulani, terdapat fokus serta pembahasan mengenai pembangunan zona integritas yang dielaborasi dengan teori integritas dan sistem hukum. Begitu pula keunikan yang terdapat pada penelitian Alfathansyah Widyantoro yang memfokuskan pembahasan serta analisis mengenai pembangunan zona integritas melalui perspektif teori administrasi publik dan reformasi birokrasi. Penelitian Andhi Sukma Hanafi dan Mugi Harsono meletakkan fokus pembahasan pada pelaksanaan serta pengukuran

⁸ Widyantoro, *Pembangunan Zona Integritas Sebagai Upaya Pemerintah Menciptakan Wilayah Bebas Korupsi*, (Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya), 2018.

⁹ Sukma, Hanafi, Andhi & Harsono Mugi, *Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dengan Pembangunan Zona Integritas Pada Kementerian Perindustrian*, *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran* (2020) Hal. 32-37

pembangunan zona integritas berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 108/M-IND/PER/12/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Penelitian kali ini dilakukan dalam tema penelitian yang sama tetapi dengan fokus masalah serta lokasi penelitian yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk memperkaya serta memperdalam kajian pada penelitian yang serupa dengan memfokuskan penelitian aspek implementasi/penerapan serta mengelaborasi fenomena penelitian dengan konsep serta teori yang terdapat dalam kajian kebijakan publik. penelitian ini akan melihat serta menganalisis fenomena penelitian berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Hogwood dan Gunn untuk mengetahui hal-hal yang berperan dalam implementasi atau penerapan sebuah kebijakan publik.

Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat melahirkan analisis serta mendeskripsikan temuan yang penelitian berdasarkan sudut pandang teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya, meskipun dengan tema penelitian yang terbilang sama. Disamping itu penelitian ini juga mengharapkan hasil penelitian dapat memperkaya serta melengkapi aspek yang belum dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten (Disdukcapil) Padang Pariaman merupakan salah satu unit kerja/satuan kerja di lingkungan Pemerintah daerah yang dapat dikatakan sukses mengimplementasikan kebijakan pembangunan zona integritas. Keberhasilan tersebut tepatnya ditunjukkan oleh Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman melalui perolehan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Tahun 2022. Sebagaimana pemberitaan yang penulis kutip pada situs resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Pariaman.¹⁰ Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) kepada Indra Anas selaku kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, sekaligus menjadi perwakilan simbolis penyerahan predikat WBK oleh MenPAN-RB pada 06 Desember 2022.



Gambar 1. 1

**Penyerahan Predikat WBK oleh Manpan
Kepada Dukcapil Padang Pariaman**

Sumber: *website* <https://dukcapil.padangpariamankab.go.id/>

¹⁰ Dukcapil Ceria, <https://dukcapil.padangpariamankab.go.id/berita/detail/dukcapil-ceria-kembali-torehkan-prestasi-terima-dua-penghargaan-dari-kemenpan-ri>, diakses 10 Oktober 2023.

Berdasarkan keterangan dari *website* resmi Kemenpan-RB, predikat zona integritas (WBK dan WBBM) pada Tahun 2022 diraih oleh 119 unit kerja di instansi pemerintah. Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari 1.061 usulan unit kerja yang tergabung dalam 209 instansi pemerintah. Dari ribuan usulan unit kerja, perolehan predikat WBK hanya mampu diraih oleh 102 unit kerja yang terdiri atas 74 unit kerja dalam lingkup kementerian/lembaga, 1 unit kerja pemerintah provinsi dan 27 unit kerja pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan, predikat WBBM diraih oleh 17 unit kerja yang terdiri dari, 13 unit kerja kementerian/lembaga, 1 unit kerja pemerintah provinsi, dan 3 unit kerja pemerintah kabupaten/kota.¹¹

Keberhasilan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman meraih predikat WBK tentu saja menjadi kebanggaan tersendiri bagi pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Dari sekian banyak unit kerja yang mengusulkan diri hanya sebagian kecil yang berhasil meraih predikat tersebut.

Pencapaian tersebut menjadi hasil yang diterima Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman atas kerja keras serta kemampuan para implementator dalam memenuhi setiap program serta kegiatan yang telah diatur dalam PermenPAN-RB. Sebagaimana pernyataan Indra Utama, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bahwa Pencapaian setiap

¹¹Kemenpan, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/beri-penghargaan-instansi-pemerintah-berprestasi-kementerian-panrb-kerja-birokrasi-harus-berdampak>, diakses pada 10 Oktober 2023.

aspek komponen pengungkit merupakan suatu kunci dalam pembangunan zona integritas.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman menjadi unit kerja percontohan dalam pembangunan zona integritas. Sejak menyabet predikat Wilayah Bebas Korupsi dari Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi birokrasi, unit kerja ini telah mendapat beberapa kali kunjungan dari unit kerja lain dalam rangka studi tiru pembangunan zona integritas. Studi tiru tersebut diantaranya dilakukan oleh Inspektorat Sumatera Barat, Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Payakumbuh, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M Natsir, RSAM Bukittinggi, RSJ Prof HB Saanin Padang, Dinas Kehutanan Sumatera Barat, Inspektorat Sijunjung, RSUD Pariaman dan Balai Kepegawaian Daerah.¹²

Keberhasilan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung seperti ketersediaan waktu, sumberdaya yang dimiliki dan lain sebagainya. sebagaimana pernyataan dari Hendra selaku Tim Penilai Internal (TPI) yang dibentuk oleh Bupati Padang Pariaman, Hendra menyebutkan bahwa:

“Pengusulan Disdukcapil sebagai unit kerja yang mewakili Padang Pariaman sudah tepat dan kita target raih penghargaan ZI WBK tahun ini”¹³

¹² Dukcapil Ceria, Komitmen Pembangunan Zona Integritas, Tim Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Laksanakan Studi Tiru ke Disdukcapil Padang Pariaman. *Link:* <https://dukcapil.padangpariamankab.go.id/berita/detail/komitmen-membangun-zona-integritas-tim-pemerintah-provinsi-sumatera-barat-laksanakan-studi-tiru-ke-disdukcapil-padang-pariaman>, diakses 14 Januari 2024.

¹³ Benteng Sumbar, Pernyataan Hendra selaku Tim Penilai Internal (TPI) pada pemberitaan *Inspektorat Padang Pariaman Kawal Disdukcapil Penilaian ZI dan WBK*, *Link Berita:*

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa perolehan predikat WBK oleh Disdukcapil memang telah dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Dari sekian banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, hanya Disdukcapil yang diusulkan untuk meraih predikat zona integritas tahun 2022.



No.	Instansi Pemerintah	No.	Unit Kerja	Usulan
17	Kabupaten Klungkung	1	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung	WBK
		2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung	WBK
18	Kabupaten Kudus	1	Puskesmas Rejosari	WBK
		2	Puskesmas Jekulo	WBK
		3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	WBK
19	Kabupaten Lamongan	1	RSUD Dr. Soegiri	WBBM
		2	RSUD Ngimbang	WBK
		3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	WBK
20	Kabupaten Madiun	1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu	WBK
		2	UPT Puskesmas Gantrung	WBK
21	Kabupaten Padang Pariaman	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	WBK
22	Kabupaten Pamekasan	1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	WBK
		2	RSUD dr. H Slamet Martodirdjo	WBK
		3	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	WBK

Gambar 1.2

Hasil Seleksi Administrasi Zona Integritas WBK/WBBM Tahun 2022

Sumber: www.panrb.go.id pengumuman tentang hasil seleksi administrasi zona integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2022.

Terdapat faktor-faktor yang dinilai dalam berperan dalam perolehan predikat WBK oleh Disdukcapil. diantaranya adalah komitmen dan pemahaman pimpinan serta pegawai terkait program zona integritas, kualitas penerapan pelayanan

terhadap publik serta inovasi yang telah dilaksanakan oleh Disdukcapil, kembali menurut Pernyataan Hendra

“Kita sama-sama sudah mengetahui bahwa Disdukcapil adalah *role model* pelayanan publik tingkat nasional dan lokasi *benchmarking/studi* banding bagi daerah lain di dalam maupun di luar Sumbar. Selain banyak banyak inovasi yang di replika dan banyak penghargaan yang telah diraih”¹⁴

Berdasarkan *track record* dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, terlihat bahwa Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman merupakan unit kerja yang cukup berprestasi. sejumlah prestasi dalam bentuk penghargaan dari level daerah sampai sampai level pemerintah pusat/nasional yang diterima oleh Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman dalam kurun waktu Tahun 2020 sampai Tahun 2022.

Tabel 1. 1

Prestasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2022

Penghargaan	Tahun	Dari/Oleh
sebagai perangkat daerah predikat (AA) berdasarkan nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	2020	Bupati Padang pariaman
sebagai penyelenggara pelayanan publik dengan kategori “pelayanan prima”	2021	MenPAN-RB
Juara 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota terbaik dalam penyelenggaraan administrasi penduduk	2021	Gubernur Sumatera Barat
peringkat 1 perangkat daerah terinovatif	2021	Bupati Padang Pariaman
penghargaan tiga terbaik unit pelayanan publik kategori kabupaten/kota	2021	Gubernur Sumatera Barat
Peringkat 3 unit penyelenggara pelayanan publik kategori “Pelayanan Prima”	2022	MenPAN-RB

Sumber: Data olahan peneliti dari Website:

<https://dukcapil.padangpariamankab.go.id/halaman/prestasi>

¹⁴ Ibid.

Berdasarkan data-data serta indikasi yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini mengambil asumsi bahwa terdapat penerapan/Implementasi pembangunan zona integritas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman serta terdapat persoalan-persoalan tertentu seperti faktor pendukung dalam keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dalam meraih Predikat Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2022. Sebab, sebagaimana pemaparan di atas bahwa dari total 1.061 (seribu enam puluh satu) unit kerja yang mengusulkan diri untuk memperoleh predikat zona integritas (WBK dan WBBM) Tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman adalah salah satu dari sebagian kecil unit kerja yang berhasil meraih predikat tersebut. Sebagai bentuk penyederhanaan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini ialah:

1. Bagaimana penerapan atau implementasi pembangunan zona integritas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sebagai unit kerja peraih predikat Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2022?
2. Apa faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dalam meraih Predikat Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2022

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk menjelaskan penerapan/implementasi pembangunan zona integritas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor pendukung dalam keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sebagai unit kerja peraih predikat WBK Tahun 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat membeikan gambaran mengenai bagaimana penerapan kebijakan pembangunan zona integritas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi individu maupun organisasi, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya.

